

BAB III

Metodologi Penelitian

III.1 Pemilihan Sampel

Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui akses terhadap data keuangan entitas daerah seluruh Indonesia yang tersedia di website Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Obyek penelitian adalah laporan keuangan entitas daerah. Populasi yang dipilih adalah Kabupaten/Kota dari tiap-tiap propinsi di Indonesia yang jumlahnya mencapai 439 Kabupaten/Kota. Dari jumlah ini diambil empat puluh (40) Kabupaten/Kota sebagai obyek penelitian.

Sampling.

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dalam pemilihan sampel, tetapi tetap berdasarkan kriteria-kriteria berikut:

1. Entitas daerah yang diteliti merupakan Kabupaten/Kota yang telah diperiksa oleh BPK-RI.
2. Kabupaten/Kota sampel menerbitkan laporan keuangan untuk tahun anggaran 2006.

Sampel dipilih berdasarkan laporan keuangan yang berhasil diambil atau didownload dari situs Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Diketahui kemudian, Laporan keuangan hasil pemeriksaan BPK yang dipublikasikan tidak berjumlah 433 seperti jumlah keseluruhan Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. Pada tahun 2006, yang menyampaikan laporan keuangan untuk diperiksa hanya sejumlah 333 Kabupaten/Kota atau 76% dari total Kabupaten/Kota. Khusus untuk propinsi DKI Jakarta tidak

dimasukkan ke dalam daftar sampel karena tiap-tiap kotamadya di DKI Jakarta tidak memiliki keharusan membuat laporan keuangan.

Kemudian, dari tiap-tiap propinsi diambil secara acak bertujuan untuk dianalisa dengan terlebih dahulu menyesuaikan dengan ketersediaan data. Sejumlah empat puluh (40) Kabupaten/Kota terpilih menjadi sampel penelitian yang mewakili 33 Propinsi di Indonesia.

III.2 Penilaian Mutu Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan yang baik seharusnya dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas pelaporan pada periode sebelumnya maupun dengan entitas pelaporan lain (PSAK No 01, 2004). Untuk memenuhi asumsi ini, dibutuhkan format dan deskripsi yang sama dalam laporan keuangan entitas pelaporan.

Standar Akuntansi Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 telah menetapkan format, deskripsi, kebijakan akuntansi terkait, dan ketentuan lainnya dengan tujuan peningkatan mutu penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan, yakni Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Lembaga/instansi terkait. Mutu Laporan Keuangan diukur dari tingkat kepatuhan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyajikan laporan keuangan dengan pemberian skor atas tiap dimensi pengukuran.

Skor terdiri dari empat nilai yaitu:

1. Nilai 3 yang berarti *good*. Sampel memperoleh nilai 3 sebagai nilai maksimal jika memenuhi semua kriteria penilaian.
2. Nilai 2 yang berarti *fair*. Sampel memperoleh nilai 2 jika memenuhi sebagian besar kriteria penilaian.

3. Nilai 1 yang berarti *poor*. Sampel akan memperoleh nilai 1 jika hanya memenuhi sebagian kecil kriteria penilaian. Dan,
4. Nilai 0 yang berarti *no*. Sampel akan memperoleh nilai minimal jika tidak memenuhi semua kriteria penilaian.

Dalam penerapan penilaian tingkat kepatuhan sampel terdapat modifikasi terkait jumlah kriteria penilaian yang tidak seragam, seperti berikut :

1. > 70 % memenuhi kriteria penilaian, sampel akan memperoleh nilai 3 untuk setiap sub-indeks atau kategori.
2. 50-70 % memenuhi kriteria penilaian, sampel akan memperoleh nilai 2 untuk setiap sub-indeks atau kategori.
3. < 50 % memenuhi kriteria penilaian, sampel akan memperoleh nilai 1 untuk setiap sub-indeks atau kategori.
4. 0 % memenuhi kriteria penilaian, sampel akan memperoleh nilai 0.

Keterangan pembobotan yang berisi kriteria penilaian dapat dilihat dalam lampiran. Berikut disajikan tabel indeks pengukuran tingkat kepatuhan pemerintah Kabupaten/Kota yang dibuat berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) BPK:

Dimensi dan Sub-Index	Skor
A. Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan:	
- Menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran	
- Menyampaikan Neraca	
- Menyampaikan Laporan Arus Kas	
- Menyertakan Catatan Atas Laporan Keuangan	
 B. Informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan	
<i>a. Laporan Realisasi Anggaran:</i>	
1. Klasifikasi Pendapatan; Pendapatan Asli Daerah, Transfer yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain, Lain-lain pendapatan yang sah	
2. Klasifikasi Belanja:	
a). Menurut Jenisnya yaitu Belanja Operasi dan Modal	
b). Menurut Organisasi artinya berdasarkan pengguna	
c). Menurut Fungsi	
3. Merinci Pembiayaan	
<i>Skor Maksimal = 15, Minimal = 0</i>	
<i>b. Neraca</i>	
1. Merinci piutang menurut jumlah piutang pajak, retribusi, penjualan, pihak terkait, uang muka, dan jumlah lainnya, piutang transfer dirinci menurut sumbernya	
2. Merinci aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas	
3. Mengungkapkan jumlah persediaan yang dimiliki	
4. Mengungkapkan utang transfer menurut entitas penerimanya	
5. Merinci klasifikasi Dana Cadangan sesuai peruntukannya	
6. Merinci ekuitas dana menjadi ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan	
<i>Skor Maksimal = 18, Minimal = 0</i>	
<i>c. Laporan Arus Kas</i>	
1. Menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan Aktivitas Operasi, Investasi Aset nonkeuangan, Pembiayaan, dan	

Dimensi dan Sub-Index	Skor
Nonanggaran	
Skor Maksimal = 3, Minimal = 0	
<i>d. Catatan atas Laporan Keuangan</i>	
1. Berisi informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, Pencapaian target Undang-Undang APBN/Perda APBD, kendala dan hambatan dalam mencapai target	
2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan	
3. Berisi informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan	
4. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka (<i>on the face</i>) laporan keuangan	
5. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan Rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas	
6. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar	
Skor Maksimal = 18, Minimal = 0	
C. Sistem Pengendalian Intern	
1. Memiliki sistem pengelolaan keuangan yang tertib	
2. Memiliki standar operasional/peraturan dan UU memadai	
3. Terdapat pemisahan tanggung jawab/wewenang terkait pendapatan dan belanja	
4. Melakukan review atas aktivitas/transaksi yang terjadi	
5. Melakukan manajemen persediaan	
6. Mengamankan dan mengelola aset yang dimiliki entitas daerah	
7. Deskripsi tugas yang jelas	
8. Kecenderungan pelanggaran terhadap Undang-Undang	
Skor Maksimal = 24, Minimal = 0	

Tabel III.2.1 Tingkat Kepatuhan Pemerintah Kabupaten / Kota

III.3 Hipotesis Penelitian

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kualitas penyusunan laporan keuangan

Pendapatan merupakan istilah yang sering ditemui dalam proses akuntansi, baik akuntansi komersial maupun akuntansi pemerintahan. Beberapa pihak mengatakan pendapatan adalah penerimaan kas yang menambah kekayaan suatu entitas, sedangkan pihak lain mengatakan bahwa pendapatan adalah seluruh hak yang dimiliki yang ditimbulkan oleh penyerahan barang dan jasa (Nordiawan dkk, 2007).

Di lingkungan akuntansi pemerintah di Indonesia, pendapatan adalah penerimaan oleh bendahara umum negara/daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan pemerintah daerah diklasifikasikan sebagai berikut; *Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-lain pendapatan yang sah.*

Berangkat dari teori pendapatan di atas, timbul asumsi semakin besar pendapatan yang dihasilkan pemerintah daerah akan memicu penyusunan laporan keuangan yang lebih berkualitas karena diasumsikan pemerintah akan mampu menggaji orang-orang yang kompeten di bidang akuntansi supaya menghasilkan output laporan keuangan yang dapat diandalkan. Pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan asli daerah. Hipotesis yang berkembang dari teori ini adalah:

Hipotesis: Pendapatan Asli Daerah berkorelasi positif dengan kualitas laporan keuangan

2. Total Aktiva berpengaruh terhadap kualitas penyusunan laporan keuangan

Aktiva atau Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya (bultek03 SAP, 2006). Karena tujuannya untuk memperoleh manfaat ekonomi dan/atau sosial, rincian mengenai detail aktiva atau aset diperlukan dalam Neraca.

Perlu diingat juga ada kendala dalam menyajikan informasi dalam laporan keuangan. Salah satunya adalah pertimbangan biaya dan manfaat di mana manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, informasi yang manfaatnya lebih kecil dibanding biaya penyusunan tidak semestinya disajikan. Contoh kendala dijelaskan sebelumnya tidak memungkinkan terwujudnya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal.

Dari permasalahan di atas diasumsikan penyajian total aktiva memberi manfaat yang lebih besar daripada biaya penyusunannya karena informasi tersebut berguna bagi para pengambil keputusan. Maka, hipotesis yang dapat dikembangkan:

Hipotesis: Total aktiva berkorelasi positif terhadap tingkat kepatuhan penyusunan laporan keuangan

III.4 Model Penelitian

Untuk pengujian hipotesis yang telah dibuat sebelumnya, model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{SCORE}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{PAD}_{it} + \beta_2 \text{AKTIVA}_{it}$$

Di mana:

SCORE_{it} = tingkat kualitas laporan keuangan Kabupaten/Kota i pada periode pengamatan t

PAD_{it} = pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota i pada periode pengamatan t

AKTIVA_{it} = total aktiva Kabupaten/Kota i pada periode pengamatan t

α = konstanta

β_1, β_2 = koefisien variabel penjelas (*independent variabel*)

III.4.1 Variabel - variabel

Variabel terikat untuk semua model adalah tingkat kualitas laporan keuangan selama setahun periode pengamatan. Tingkat kualitas laporan keuangan ini diperoleh dari penjumlahan skor atau nilai Kabupaten/Kota sampel pada saat membuat *self assesment check-list* yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Variabel bebas untuk semua model adalah:

- a. PAD, yaitu salah satu dari klasifikasi pendapatan dalam anggaran yang diperoleh bukan dari transfer atau dana perimbangan, melainkan dari aktivitas yang dilakukan daerah itu.
- b. AKTIVA, yaitu jumlah harta yang dimiliki daerah mencakup harta lancar dan harta tetap.

III.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data *cross-section* di mana hanya terdapat satu periode penelitian yaitu tahun 2006 dengan dua variabel bebas.

III.5.1 Pengujian Asumsi Dasar

Model penelitian diregresi dengan menggunakan estimator kuadrat terkecil atau *Ordinary Least Square* (OLS). Pada data *cross-section*, hasil regresi dari model penelitian akan dapat digunakan sebagai alat prediksi yang baik jika memenuhi asumsi-asumsi dasar berikut:

1. Mempunyai varians eror yang konstan untuk tiap variabel independen bersifat homoskedastis
2. Tidak ada multikolinieritas sempurna antarvariabel independen.

III.5.1.1 Heteroskedastisitas

Asumsi dalam model regresi adalah:

1. residual (e_i) memiliki nilai rata-rata nol
2. residual memiliki varian yang konstan atau $\text{var}(e_i) = \sigma^2$
3. residual suatu observasi tidak saling berhubungan dengan residual observasi lainnya atau $\text{cov}(e_i, e_j) = 0$, sehingga menghasilkan estimator yang *Best Linear Unbiased Estimated* (BLUE).

Apabila asumsi 1 tidak terpenuhi, yang terpengaruh hanyalah slope estimator dan ini tidak memawa konsekuensi serius dalam analisis ekonometris. Sedangkan apabila asumsi 2 dan 3 dilanggar, maka akan membawa dampak serius bagi prediksi dengan model yang dibangun.

Dalam kenyataan, nilai residual sulit memiliki varian yang konstan. Hal ini sering terjadi pada data yang bersifat *cross-section* dibanding *time series*. Untuk

mendeteksi ada tidaknya gangguan maka digunakan metode secara eksak melalui pengujian *white's general heteroscedasticity test* yang terdapat pada program E-Views. Jika probabilita hasil perkalian observasi dengan *R-squared* menunjukkan nilai lebih besar dari 5%, maka terdapat heterokedastisitas pada model regresi.

Untuk menghilangkan masalah heterokedastisitas ini, ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan (Gujarati, 2005). Pertama, menggunakan metode WLS (Weighted Least Square) atau kuadrat terkecil tertimbang yaitu memagi persamaan regresi dengan standar deviasi variabel terikat (jika varian dan residual diketahui). Kedua, menggunakan metode White untuk menghilangkan sifat heterokedastis dari eror seandainya varian tidak diketahui. Ketiga, menggunakan metode Transformasi yaitu coba-coba mengubah persamaan dengan cara yang konsisten supaya masalah heterokedastisitas hilang.

III.5.1.2 Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan linear antarvariabel independen. Karena melibatkan beberapa variabel independen, maka multikolinearitas tidak akan terjadi pada persamaan regresi sederhana yang terdiri atas satu variabel dependen dan satu variabel independen. Indikasi terjadinya multikolinear ditunjukkan bila nilai R^2 tinggi, tetapi variabel independen banyak yang tidak signifikan.

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menghilangkan multikolinearitas, yaitu:

1. Biarkan saja model tersebut mengandung multikolinearitas, karena estimatornya masih dapat bersifat BLUE. Sifat BLUE tidak terpengaruh oleh ada tidaknya korelasi antar variabel independent. Namun, harus diketahui bahwa multikolinearitas akan menyebabkan *standard error* yang besar.

2. Tambahkan datanya bila memungkinkan, karena masalah multikolinearitas biasanya muncul karena jumlah observasinya sedikit.
3. Hilangkan salah satu variabel independent, terutama yang memiliki hubungan linear yang kuat dengan variabel lain. Namun, apabila menurut teori variabel independen tersebut tidak mungkin dihilangkan, berarti harus tetap dipakai.
4. Transformasikan salah satu atau beberapa variabel, termasuk misalnya dengan melakukan diferensi.

Multikolinearitas dianggap menjadi masalah yang cukup serius apabila nilai mutlak koefisien korelasi antar variabel-variabel independen lebih besar dari 0,8.

III.6 Prosedur Pengolahan Data

Pengujian dilakukan dengan *software Eviews 4.1* dengan memakai jenis data *cross-section* untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Prosedur pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menyeleksi sampel berdasarkan kelengkapan laporan keuangan dan dipilih sesuai dengan kriteria yang ingin dicapai dari 33 propinsi.
2. Melengkapi *check-list* yang telah dibuat untuk mendapatkan total skor indeks. Skor ini menjadi dasar analisa apakah dipengaruhi oleh variabel-variabel independen.
3. Mengkoversi data Pendapatan dan total aktiva sebagai variabel independen dengan program *Microsoft Excel*.
4. Mengolah data menggunakan program *Eviews 4.1*. Dalam pengolahan data, semua variabel dimasukkan secara bersamaan dengan tujuan melihat kontribusi masing-masing variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

5. Melakukan pengujian statistik untuk menguji apakah hasil regresi data *cross-section* layak digunakan atau tidak, dengan langkah-langkah berikut:
 - a. Melakukan uji *Best Linear Unbiased Estimated (BLUE)* yaitu persamaan yang memenuhi dua asumsi dasar, bebas heterokedastisitas serta multikolinearitas.
 - b. Melakukan uji kelayakan model dan signifikansi yaitu dengan cara melihat berapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
 - c. Melakukan analisa hasil pengolahan data dan temuan.

